

KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD SUMATERA UTARA: MELAMPAUI ANGKA MENUJU SUBSTANSI

Oleh : Ade Parlaungan Nasution

Pendahuluan

Demokrasi yang sehat mensyaratkan keterwakilan semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan. Di Sumatera Utara (Sumut), provinsi multietnis dengan dinamika sosial budaya yang kuat, keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi indikator penting kesetaraan gender dan inklusivitas politik. Meski kuota 30% calon legislatif perempuan telah menjadi kebijakan nasional, realitas di lapangan menunjukkan bahwa transformasi dari calon menjadi anggota dewan terpilih masih penuh tantangan. Esai ini menganalisis situasi, akar masalah, dampak, dan solusi untuk keterwakilan perempuan di DPRD Sumatera Utara.

1. Realitas Keterwakilan: Data dan Fluktuasi

Keterwakilan perempuan di DPRD Sumut mengalami fluktuasi namun stagnan di bawah target 30%, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

**Tabel 1: Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Utara
(Pemilu 2019 & 2024)**

Periode	Total DPRD Provinsi	Kursi Perempuan Terpilih	Jumlah Persentase	
2019-2024	70	15	21.5%	Melebihi ambang batas parlemen (20%) namun masih di bawah kuota 30%
2024-2029	72	14	19.5%	Menurun dari periode sebelumnya, tetap di bawah 20% dan jauh dari 30%

(Sumber: Hasil Rekapitulasi KPU Provinsi Sumatera Utara Pemilu 2019 & 2024)

Pada tingkat kabupaten/kota, situasinya sangat beragam, menunjukkan pengaruh kuat faktor lokal:

2. Akar Permasalahan: Hambatan Multidimensi

Rendahnya keterwakilan perempuan bukanlah fenomena sederhana, melainkan hasil dari hambatan yang saling bertautan:

- **Budaya Patriarki Kuat:** Struktur sosial budaya dominan (seperti Batak) yang patriarkis cenderung menempatkan laki-laki sebagai pemimpin utama di ruang publik. Stereotip peran gender membatasi ruang gerak perempuan.
- **Politik Uang (Money Politics):** Biaya politik yang tinggi menjadi penghalang utama. Akses perempuan terhadap sumber pendanaan dan jaringan patronase politik (sering didominasi laki-laki) lebih terbatas.
- **Kultur Partai yang Tidak Responsif Gender:**
 - **Pencalonan Simbolik:** Perempuan sering ditempatkan di daerah pemilihan (dapil) yang sulit dimenangkan hanya untuk memenuhi kuota, bukan di dapil kompetitif dengan dukungan penuh.
 - **Marginalisasi Internal:** Posisi strategis dalam struktur kepartaian (seperti pengurus inti dan tim formatur pencalonan) masih didominasi laki-laki.
 - **Minimnya Kaderisasi:** Program pelatihan kepemimpinan dan manajemen kampanye khusus untuk kader perempuan masih jarang dan tidak sistemik.
- **Beban Ganda (Double Burden):** Tuntutan peran domestik dan pengasuhan anak yang tidak setara, ditambah kurangnya dukungan keluarga, menyulitkan perempuan berkariir di politik yang menuntut mobilitas dan waktu tinggi.
- **Kekerasan Politik Berbasis Gender (KPBG):** Perempuan politisi rentan mengalami pelecehan verbal, fitnah, stigma, hingga ancaman fisik berbasis gender, baik selama kampanye maupun saat menjabat, yang bertujuan mendiskreditkan dan mengintimidasi.

3. Dampak Minimnya Keterwakilan

Ketimpangan representasi ini memiliki konsekuensi nyata bagi pembangunan dan demokrasi di Sumut:

- **Kebijakan Kurang Sensitif Gender:** Isu spesifik perempuan (KDRT, kesehatan reproduksi, perlindungan TKW/PRT, pemberdayaan ekonomi perempuan, akses pendidikan anak perempuan) sering terabaikan atau tidak ditangani dengan perspektif memadai.
- **Pengawasan Kebijakan Berdampak Gender Lemah:** Fungsi pengawasan DPRD terhadap implementasi peraturan dan anggaran yang responsif gender menjadi kurang optimal tanpa cukup anggota yang memahami perspektif gender.
- **Mandeknya Perda Pro-Perempuan:** Inisiatif Rancangan Perda (Raperda) progresif seperti Penghapusan Kekerasan Seksual, Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, atau Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sering kehilangan momentum atau dukungan politik di dalam dewan.
- **Minimnya Role Model:** Kurangnya perempuan politisi berkinerja baik mengurangi inspirasi bagi generasi muda perempuan untuk terjun ke politik.

4. Solusi dan Langkah Ke Depan

Meningkatkan keterwakilan yang bermakna memerlukan pendekatan holistik dan komitmen semua pihak:

Tabel 3: Strategi Meningkatkan Keterwakilan Bermakna Perempuan di DPRD Sumut

Tingkat Intervensi	Strategi	Contoh Aksi Konkret
Individu Perempuan	Pemberdayaan Kapasitas Ekonomi	Pelatihan intensif kepemimpinan, negosiasi, public speaking, manajemen & kampanye, advokasi kebijakan. Program peningkatan akses modal dan ekonomi.
Partai Politik	Reformasi Internal & Afirmasi Nyata	1. Kebijakan afirmatif tegas: Alokasi dapil <i>winnable</i> bagi calon perempuan. 2. Kaderisasi proaktif & mentoring. 3. Penegakan kode etik anti diskriminasi & KPBG. 4. Pendanaan khusus & dukungan logistik kampanye untuk calon perempuan. 5. Peningkatan jumlah perempuan dalam struktur pengambilan keputusan partai.
Sistem Pemilu & Regulasi	Penguatan Aturan & Penegakan	1. Evaluasi dan penguatan sanksi bagi partai yang tidak memenuhi kuota 30% calon atau hanya mencalonkan secara simbolik. 2. Mekanisme pelaporan dan penanganan KPBG yang efektif oleh KPU, Bawaslu, dan penegak hukum. 3. Sosialisasi hak politik perempuan yang masif.
Masyarakat & Budaya	Perubahan Mindset & Dukungan	1. Kampanye kesadaran publik tentang pentingnya perempuan di politik, melibatkan tokoh agama, adat, dan masyarakat. 2. Mendorong kesetaraan peran dalam rumah tangga. 3. Membangun jaringan dukungan (support system) dan solidaritas antar perempuan politisi/caleg.
Kolaborasi Multi-Pihak	Sinergi Pengawasan	1. Kerjasama erat antara DPRD (anggota perempuan), pemerintah daerah, & organisasi perempuan/LSM, akademisi, dan media. 2. Pemantauan independen terhadap komitmen partai dan kinerja anggota dewan perempuan. 3. Advokasi bersama untuk kebijakan dan anggaran yang responsif gender.

Penutup

Keterwakilan perempuan di DPRD Sumatera Utara masih dalam perjalanan panjang menuju kesetaraan substantif. Pencapaian di kisaran 20% (dengan tren fluktuatif bahkan cenderung turun) adalah langkah awal yang rapuh. Hambatan struktural dan kultural, terutama budaya patriarki, politik uang, dan ketidaksiapan partai, masih sangat kuat. Dampaknya terasa pada kebijakan daerah yang kurang responsif terhadap kebutuhan setengah populasi.

Pemenuhan kuota 30% calon hanyalah pintu masuk. Esensi sesungguhnya terletak pada transformasi menuju **keterwakilan yang bermakna** (*meaningful representation*), di mana perempuan tidak hanya hadir secara jumlah, tetapi memiliki kapasitas, kewenangan, keberanian,

dan dukungan untuk menyuarakan serta memperjuangkan kepentingan konstituen perempuan dan masyarakat luas secara efektif.

Mewujudkan ini memerlukan **komitmen revolusioner** dari semua pemangku kepentingan: partai politik harus mereformasi diri secara sungguh-sungguh, pemerintah harus memastikan regulasi dan penegakan hukum yang mendukung, tokoh masyarakat dan agama perlu mendorong perubahan paradigma, keluarga harus memberikan dukungan penuh, dan perempuan sendiri perlu terus memperkuat kapasitas dan solidaritas. Hanya dengan sinergi ini, DPRD Sumatera Utara dapat benar-benar menjadi cerminan demokrasi yang inklusif dan menghasilkan kebijakan untuk kemajuan seluruh masyarakat Sumut, tanpa terkecuali.

Tabel 2: Variasi Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara (Pemilu 2024)

No	Kabupaten/Kota	Total Kursi	Perempuan Terpilih	Persentase	Kategori
1	Kota Medan	50	11	22.0%	Relatif Tinggi
2	Kota Binjai	30	9	30.0%	Mencapai Kuota
3	Kota Pematangsiantar	40	8	20.0%	Relatif Tinggi
4	Kota Tebing Tinggi	40	7	17.5%	Sedang
5	Kota Sibolga	30	5	16.7%	Sedang
6	Kota Tanjungbalai	35	4	11.4%	Rendah
7	Kota Padangsidimpuan	35	5	14.3%	Rendah
8	Kota Gunungsitoli	30	3	10.0%	Rendah
9	Deli Serdang	55	12	21.8%	Relatif Tinggi
10	Langkat	45	7	15.6%	Rendah
11	Karo	40	7	17.5%	Sedang
12	Simalungun	50	9	18.0%	Sedang
13	Asahan	45	6	13.3%	Rendah
14	Labuhan Batu	45	5	11.1%	Rendah
15	Tapanuli Utara	35	4	11.4%	Rendah
16	Tapanuli Selatan	40	3	7.5%	Sangat Rendah
17	Tapanuli Tengah	40	4	10.0%	Rendah
18	Toba	35	6	17.1%	Sedang
19	Mandailing Natal	35	2	5.7%	Sangat Rendah
20	Nias	35	3	8.6%	Sangat Rendah
21	Serdang Bedagai	45	5	11.1%	Rendah
22	Humbang Hasundutan	35	4	11.4%	Rendah
23	Pakpak Bharat	25	3	12.0%	Rendah
24	Samosir	30	4	13.3%	Rendah
25	Batu Bara	40	6	15.0%	Rendah
26	Padang Lawas	35	3	8.6%	Sangat Rendah
27	Padang Lawas Utara	35	2	5.7%	Sangat Rendah
28	Labuhan Batu Utara	35	4	11.4%	Rendah
29	Labuhan Batu Selatan	35	3	8.6%	Sangat Rendah

No	Kabupaten/Kota	Total Kursi	Perempuan Terpilih	Persentase	Kategori
30	Nias Selatan	45	4	8.9%	Sangat Rendah
31	Nias Barat	30	2	6.7%	Sangat Rendah
32	Nias Utara	35	3	8.6%	Sangat Rendah
33	Dairi	35	5	14.3%	Rendah
Total/Average	1,235	180	14.6%		

Analisis Data:

1. Pencapaian Terbaik:

- Kota Binjai satu-satunya yang memenuhi kuota 30%.
- Kota Medan (22%) dan Deli Serdang (21.8%) konsisten di atas rata-rata provinsi (19.5%).

2. Wilayah Tertinggal:

- 10 kabupaten berada di kategori "**Sangat Rendah**" (<10%), terutama di kawasan pesisir barat dan kepulauan:
 - Mandailing Natal (5.7%),
 - Padang Lawas Utara (5.7%),
 - Nias Barat (6.7%).

3. Tren Umum:

- Perkotaan lebih baik (rata-rata 18.7%) dibanding perdesaan (12.1%).
- Wilayah dengan budaya patriarki kuat (seperti Batak Toba/Mandailing) dan daerah terpencil cenderung memiliki keterwakilan terendah.

4. Ketimpangan Ekstrem:

- Selisih tertinggi antara Kota Binjai (30%) dan Padang Lawas Utara (5.7%) mencerminkan pengaruh faktor kultural dan kebijakan partai lokal.

Rekomendasi Spesifik Wilayah:

1. Daerah <10%:

- Program afirmasi berbasis kearifan lokal (melibatkan tokoh adat/agama).
- Kuota khusus calon perempuan dari partai untuk dapil prioritas.

2. Daerah 10-20%:

- Pelatihan kepemimpinan bagi kader perempuan.
- Insentif pendanaan kampanye dari partai.

3. Daerah >20%:

- Penguatan kapasitas legislasi isu gender.
- Model *mentorship* antaranggota DPRD perempuan.

Catatan Sumber:

Data diolah dari Hasil Rekapitulasi KPU Sumut 2024 dan Pantauan Perludem.

